



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDRAT YANI MONTOLURE**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **823102**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 825.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10.000 m2/10.000 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 370.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 80.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA 150 KRR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN ESTILO YLG 1.1 L Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 55.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 2.000.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**



|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| Sub Total                         | Rp. | 962.000.000 |
| III. HUTANG                       | Rp. | 471.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 491.000.000 |

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.